

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Mei 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DRS. H. SAMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
3. NHK : **752075**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.651.900.000
1. Tanah Seluas 4.060 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.624.000.000		
2. Tanah Seluas 1.727 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 863.500.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 876 m2/42 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.400.000		
4. Tanah Seluas 1.570 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 314.000.000		
5. Tanah Seluas 1.000 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4.000 m2/1.200 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	225.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.040.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	332.146.712
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	10.249.046.712
III. HUTANG	Rp.	1.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.249.046.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.